



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah  
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>

**FACTUM**: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 10(1), 113-126.

RESEARCH ARTICLE

---

---

## KIPRAH PARTAI RAKYAT PASUNDAN DALAM NEGARA PASUNDAN 1947-1950

Sugih Rachmat Pangersa

*Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia*

*sginerp11@gmail.com*

Naskah diterima : 30 September 2020, Naskah direvisi : 28 Maret 2021 Naskah disetujui : 20 April 2021

**To cite this article:** Pangersa, S.R. (2021). Kiprah partai rakyat pasundan dalam negara pasundan 1947-1950. **FACTUM**: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 10(1), 113-126. <https://doi.org/10.17509/factum.v10i1.28565>

---

---

### Abstract

This research is entitled "The Role of Pasundan People's Party in Pasundan State from 1947-1950". The main problem is to find out "How was the role of the Pasundan people's party in the Pasundan state from 1947-1950?". The method used in this research is the historical method. The author concluded that the formation of Partai Rakyat Pasundan was motivated by Suria Kartalegawa's intention to lead West Java and supported by the Dutch who also wanted to form a Federal State in Indonesia. Suria Kartalegawa as a founding figure played an important role in the formation of the Pasundan People's Party which later declared the Pasundan State. The activities of the Pasundan People's Party in the government of the Pasundan State which divided into two, the first one is the Pasundan State declared by Suria Kartalegawa and the second one is the Pasundan State as a result of the West Java Conference. Suria Kartalegawa's version of the Pasundan State did not last long due to the lack of support from several elements of society, both from figures or the West Java community itself, and was considered a counter-revolutionary movement. Then the Pasundan version of the West Java Conference led by Wiranatakusumah V produced three West Java conferences, in this period Suria Kartalegawa and his Pasundan People's Party were more active in the Pasundan State Parliament withstand more in the opposition side. The Pasundan People's Party faded and disbanded itself following the disbandment of the Pasundan State in 1950 and the arrest of Suria Kartalegawa, and then West Java again became part of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** Pasundan State, Pasundan People's Party, Suria Kartalegawa

### Abstrak

Masalah utama yang diambil dalam penelitian ini adalah "Bagaimana kiprah partai rakyat pasundan dalam negara pasundan dari tahun 1947-1950?". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa terbentuknya Partai Rakyat Pasundan dilatarbelakangi oleh keinginan Suria Kartalegawa memimpin Jawa Barat dan dibantu oleh Belanda yang juga ingin membentuk Negara Federal di Indonesia. Suria Kartalegawa sebagai tokoh pendiri berperan penting dalam terbentuknya Partai Rakyat Pasundan yang mendeklarasikan Negara Pasundan. Sepak terjang Partai Rakyat Pasundan dalam pemerintahan Negara Pasundan yang terbagi menjadi dua, pertama Negara Pasundan yang dideklarasikan oleh Suria Kartalegawa dan kedua, Negara Pasundan hasil Konfrensi Jawa Barat. Negara Pasundan versi Suria Kartalegawa tidak berlangsung lama karena kurangnya dukungan dari beberapa elemen masyarakat baik dari tokoh-tokoh atau masyarakat Jawa Barat itu sendiri dan dianggap sebagai gerakan kontra Revolusi. Kemudian Negara Pasundan versi Konfrensi Jawa Barat yang dipimpin oleh Wiranatakusumah V menghasilkan tiga kali konfrensi Jawa Barat. Dalam hal ini Suria Kartalegawa dan Partai Rakyat Pasundan-nya lebih aktif dalam Parlemen Negara Pasundan dengan sikap yang lebih banyak menjadi oposisi. Partai Rakyat Pasundan redup dan bubar dengan sendirinya seiring dengan dibubarkannya Negara Pasundan pada tahun 1950 dan ditangkapnya Suria Kartalegawa kemudian Jawa Barat kembali menjadi bagian dari Republik Indonesia.

**Kata kunci :** Negara Pasundan, Partai Rakyat Pasundan, Suria Kartalegawa

## **PENDAHULUAN**

Dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, terutama saat-saat di mana pasukan Belanda serta Inggris datang (kembali) ke Indonesia dengan membawa segala kegaduhan yang dibuatnya terutama pertempuran-pertempuran yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti pertempuran lima hari di Semarang, Bandung Lautan Api, Medan Area, Pertempuran Ambarawa, hingga yang terbesar adalah pertempuran 10 November di Surabaya menekankan kembali perlunya perjuangan rakyat dalam mempertahankan Republik Indonesia. Masa ini disebut dengan masa Revolusi Indonesia. Menurut Ricklefs (2005, hlm. 428):

“Dengan demikian tampak bahwa istilah “revolusi” dan “revolusi Indonesia” telah mengalami pasang surut dalam pemaknaannya di dalam masyarakat kita. Pada masa kemerdekaan 1945-1949, istilah “revolusi” dan “revolusi Indonesia” dipergunakan secara luas untuk menyebut perjuangan dan pergolakan pada masa itu. Revolusi yang menjadi alat tercapainya kemerdekaan bukan hanya merupakan kisah sentral dalam sejarah Indonesia, melainkan unsur yang sangat kuat dalam persepsi bangsa Indonesia tentang dirinya sendiri [...]”.

Dalam proses awal Revolusi terutama dalam pertempuran yang terbesar dengan sekutu ini yakni pertempuran 10 November di Surabaya ini, menjadi titik balik perdebatan tentang perlunya bertempur atau berunding dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran Surabaya dimaksudkan suatu ekspedisi menghukum, tetapi ternyata perlawanan yang diperoleh dari pasukan Inggris mengherankan dan menggemparkan mereka. Menurut David Wehl yang dikutip oleh Anderson (1988, hlm. 193-194):

“Jika seandainya pertempuran-pertempuran seperti itu berlangsung di seluruh Jawa, jutaan orang akan tewas dan baik Republik Indonesia maupun Hindia Timur Belanda akan tenggelam lautan darah. Kemungkinan ini selalu terletak

di hadapan mata para panglima Sekutu pada waktu itu, dan banyak sekali mempengaruhi jalan pikiran mereka, suatu pengaruh yang tidak selalu dapat diterima di negeri Belanda [...]”

Maka dari itu mungkin pertempuran Surabaya yang terjadi pada bulan Oktober dan November 1945 yang banyak memakan korban jiwa dapat ditinjau ulang dalam segi perlawanan Indonesia dalam jalannya Revolusi terutama dalam hal atau pilihan bertempur atau berunding. “... merupakan titik balik bagi elite pemimpin Indonesia untuk melakukan refleksi: apakah perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan itu akan dilakukan dengan cara bertempur atau berdiplomasi” (Suwirta, 2015, hlm. 7) hingga akhirnya, Republik Indonesia lebih condong memilih untuk berdiplomasi dengan pihak sekutu dalam hal ini adalah Belanda. Perundingan-perundingan yang terjadi dimulai dari perundingan Hooge Veluwe, Linggarjati, Renville, Roem- Roijen hingga Konferensi Meja Bundar di Den Haag.

Perundingan-perundingan tersebut menuai pro dan kontra, misal saja perundingan Linggarjati. Tanggal 15 November 1946, di mana ketika itu Sutan Sjahrir memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Linggarjati, delegasi Belanda diketuai oleh Schmerchon dan ditengahi oleh perwakilan dari Inggris, yakni Lord Killearn (Roem, 1977, hlm. 9). Menurut Moedjianto (1988, hlm. 181 – 182) hasil Pokok perjanjian Linggarjati sebagai berikut :

- (1) Pemerintah Belanda mengakui kenyataan kekuasaan *de facto* Pemerintah RI atas Jawa, Madura dan Sumatra.
- (2) Daerah-daerah yang diduduki oleh tentara Sekutu atau Belanda secara berangsur-angsur dan dengan kerjasama kedua pihak akan dimasukkan ke dalam daerah RI (Pasal 1).
- (3) Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI akan bekerjasama untuk membentuk NIS yang meliputi seluruh wilayah Hindia Belanda sebagai negara berdaulat, dengan mengingat cara-cara yang demokratis dan

- hak menentukan nasib sendiri (pasal 2, 3 dan 5 ayat 2).
- (4) Pemerintah Belanda dan RI akan membentuk Uni Indonesia Belanda. Adapun negeri Belanda dalam pengertian ini meliputi juga Suriname dan Curacao, sedangkan yang dimaksud dengan Indonesia ialah NIS. Uni dipimpin oleh raja Belanda dan bertujuan untuk mengurus penyelenggaraan kepentingan bersama (pasal 6 dan 8).
  - (5) Pemerintah Belanda dan RI akan mengusahakan agar pembentukan NIS dan Uni bisa diselesaikan sebelum 1 Januari 1949 (pasal 12).
  - (6) Pemerintah RI mengakui, memulihkan dan melindungi hak milik orang asing (pasal 14).
  - (7) Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI setuju untuk mengadakan pengurangan tentara dan kerjasama dalam hal ketentaraan (pasal 16, lihat juga pasal 1).
  - (8) Jika terjadi perselisihan antara Pemerintah Belanda dan Pemerintah RI perihal pelaksanaan persetujuan ini, maka kedua pihak akan menyerahkan persoalannya kepada sebuah komisi arbitrase untuk memecahkannya (pasal 17).

Rakyat banyak yang tidak setuju dengan perundingan tersebut, pasalnya Indonesia dianggap sangat dirugikan dalam perjanjian. Bayangkan saja, Indonesia yang memiliki wilayah dari Sabang (Sumatera) hingga Merauke (Papua) harus mengakui wilayahnya hanya Jawa, Madura dan Sumatera. Hal ini banyak mendapatkan protes dari masyarakat. Tetapi, jalan baiknya adalah genjatan senjata yang dilakukan oleh pihak Belanda dan Indonesia menurut Roem (1972, hlm. 88) “genjatan senjata ini harus benar-benar ditaati dan prinsip-prinsip politik yang harus dilaksanakan bagi kebebasan, kedaulatan dan kerjasama antar dua bangsa besar [...]”. Satu hal lain yang menjadi tendensi dalam perundingan Linggarjati adalah sistem pemerintahan Federal yang terjadi dikehendaki dalam perundingan

Linggarjati. Van Mook salah seorang anggota dari perwakilan Belanda dalam perundingan Linggarjati, juga sebagai Former Governor-General of the Dutch East Indies menyatakan bahwa sistem federasi tersebut merupakan kerjasama antara Belanda dan Indonesia (Kahin, 2013, hlm. 278). Dalam pandangan tokoh-tokoh Republikan hal ini menjadi suatu ancaman karena dinilai dapat memecah-belah Indonesia. Bagi tokoh-tokoh non-Republikan terutama para pemangku kekuasaan di wilayahnya masing-masing hal ini menjadi satu kesempatan selain untuk mengkritisi pemerintah juga berkuasa (kembali) di wilayahnya masing-masing tanpa campur tangan lebih dari pihak pemerintah Indonesia. Gerakan pasca perjanjian Linggarjati ini terjadi juga di Jawa Barat. Beberapa tokoh Non-Republikan sangat menggelorakan semangatnya untuk kembali menjadi penguasa di wilayahnya, salah satunya adalah R.A.A.M Suria Kartalegawa yang kemudian akan disebut dengan Suria Kartalegawa yang merupakan mantan Bupati Garut (1929-1944). Selain itu, ia merupakan cucu Penghulu Kepala (Hofdpenghoeloe) Kabupaten Limbangan (kemudian menjadi

Kabupaten Garut) R. Muhamad Musa. R. Muhamad Musa sangat terkenal, karena jabatannya sebagai Penghulu. Di dalam sistem administrasi kolonial, jabatan penghulu adalah salah satu pangkat tertinggi untuk masyarakat Bumiputra, hampir setara dengan Regent atau Bupati, Patih, Jaksa dan Wedana, dengan demikian R. Muhamad Musa bagaikan penguasa di Kabupaten Limbangan kala itu (Horiyama, 2013, hlm. 135). Selain itu, beberapa hal seperti; pertikaian para elit khususnya di Jawa Barat serta kurang puasnya beberapa elit terutama Suria Kartalegawa dengan diangkatnya Sutardjo Kartohadikusumo, Datuk Jamin dan Dr. Murjani sebagai Gubernur Jawa Barat kesatu hingga ketiga secara berurutan padahal mereka merupakan orang Jawa (Tuhuteru, tt, hlm. 11)

Selain dirinya merupakan seorang yang non-Republikan, ia pun dekat dengan para pejabat

Belanda di Indonesia. Dalam konteks ini, mereka membuat kesepakatan atas kepentingan mereka masing-masing. Kesepakatan tersebut adalah gagasan tentang negara federal bagi Indonesia dengan tujuan untuk mendirikan negara bagian di wilayah Jawa Barat, yakni Negara Pasundan. Sebelum negara Pasundan didirikan maka diperlukan dukungan tidak hanya secara politis, namun secara sosial budaya. Maka dari itu, didirikanlah Partai Rakyat Pasundan yang kemudian akan disebut dengan PRP. PRP sangat menarik perhatian, pasalnya pada tahun-tahun yang sama ketika partai politik lain memperkenalkan dirinya berdasarkan ideologi yang dianutnya semisal Partai Sosialis Indonesia (PSI) yang berideologi sosialis, Partai Komunis Indonesia (PKI) yang berideologi komunis, Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang berideologikan Islam, namun PRP hadir sebagai partai yang bercorak kedaerahan berbeda dengan partai politik lain yang eksis ketika itu. Jelas hal ini menjadi tanda bahwa PRP didirikan kepentingan primodialisme (Zuhdi, 1994, hlm. 11).

Pembahasan yang lebih mendalam terkait artikel ini akan membahas bagaimana kiprah Partai Rakyat Pasundan dalam Negara Pasundan. Jelas harus dibedakan Negara Pasundan I dan II dimana dalam perjalanan Negara Pasundan I pada tahun 1947 akan lebih membahas bagaimana PRP menjalankan roda pemerintahan karena yang menjadi Wali Negara saat itu adalah Suria Kartalegawa. Negara Pasundan II pada tahun 1948 yang menjadi Wali Negara adalah seorang Republikan, yakni R.A.A Wiranatakusumah V yang kemudian akan disebut dengan Wiranatakusumah V. Pada masa negara Pasundan II, PRP melakukan peranannya, karena Wiranatakusumah V dianggap bertentangan dengan kepentingan PRP terutama Suria Kartalegawa, PRP lebih banyak menjadi oposisi dalam konteks pemerintahan Negara Pasundan. Namun meskipun begitu, terkadang PRP setuju dengan beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Wali Negara atau jajarannya yang lain bila

kepentingan tersebut dianggap sejalan dengan kepentingan PRP. Pada akhirnya PRP bubar pada tahun 1950 seiring dengan bubarnya Negara Pasundan.

## **METODE**

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, menggunakan juga Metodologi Sejarah yang menurut Sjamsuddin (2012, hlm. 14) dengan langkah-langkah seperi; Heuristik, Kritik, Verifikasi dan Historiografi. Dalam hal ini lebih menggunakan kajian literatur. Dimana sumber-sumber penulisan berfokus pada sumber-sumber literatur tersebut. “[...]sumber literatur dapat merupakan sumber yang tidak langsung ataupun sumber langsung” (Sugiyono, 2016, hlm. 309). Dimana didalamnya berupa buku, jurnal profesional, skripsi, disertasi, tesis, dan sumber elektronik serta hasil-hasil penelitian sebelumnya yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Langkah-langkah yang digunakan dalam kajian literatur ini seperti yang diungkapkan oleh Satori & Komariah (2014, hlm. 89):

- a) menganalisis pernyataan masalah,
- b) menemukan dan membaca literatur kedua,
- c) memilih indeks yang tepat sebagai pedoman yang berguna atau database,
- d) mengubah pernyataan masalah menjadi bahasa pencari,
- e) membaca literatur utama,
- f) menata catatan dan g) menulis tinjauan”.

## **PEMBAHASAN**

### **Kelahiran PRP dan Negara Pasundan Jilid I**

Sistem primodialisme yang beberapa hal sudah dibahas diatas ternyata tidak memudahkan Belanda dalam konsensinya untuk membentuk negara Federal di Indonesia (Kartodirdjo, Poesponegoro, & Notosusanto, hlm. 98). Meskipun Belanda melupakan bahwa Jawa Barat merupakan wilayah yang beragam.

Menurut Sumardjo (2015, hlm. 159) dilihat dari bahasanya, sudah ada bahasa Cirebon, Sunda dan Jawa Banten. Dilihat dari kelompok ras sudah ada kelompok Tionghoa dan Arab, jika dilihat dari keseniannya sudah beragam lagi ada gaya Pakelaran dan Pakidulan (Priangan dan Sukabumi). Pada 18 November 1946, beberapa hari setelah perundingan Linggarjati dengan didukung pihak Belanda dan beberapa tokoh non-Republikan di Jawa Barat, Suria Kartalegawa mendirikan PRP. Ia sangat mengidentikkan dirinya dengan PRP maka muncul pernyataan Suria Kartalegawa adalah PRP dan PRP adalah Suria Kartalegawa. Nampaknya, Kartalegawa sangat memanfaatkan hubungan dekatnya dengan pihak Belanda, hingga Kartalegawa dijanjikan untuk menjadi bupati dan tujuh turunan kemudian (Sjamsuddin et al, 1992, hlm. 29). Tetapi, pihak Belanda menggunakan sistem dua wajah dihadapan Kartalegawa untuk memanfaatkannya. Di depan terlihat baik, di belakang sangat merendahnya. Lihat saja gelagat Van Mook yang seolah-olah mendukung pendirian PRP ketika awal kemunculannya tetapi dibelakang dia mengatakan bahwa sesungguhnya Kartalegawa dengan PRP nya adalah de corrupte figure (Wal, 1976, hlm. 577).

Tujuan pembentukan PRP adalah membentuk suatu negara di Jawa Barat yang terpisah dari Republik Indonesia. Dalam hal ini Suria Kartalegawa dengan sengaja atau tidak menjadi alat dari Van Mook dalam usahanya mencari jalan sendiri di luar kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dengan pemerintah Indonesia. Sudah sejak perundingan-perundingan dengan Perdana Menteri Sutan Sjahrir awal 1946 kedua belah pihak memutuskan untuk bersama-sama membentuk Negara Indonesia Serikat, dimana Jawa Barat termasuk kedalam Republik Indonesia. Sebelum naskah perundingan Linggarjati disahkan (ratifikasi), lima hari setelah itu Suria Kertalegawa membentuk PRP dengan tujuan: mencapai kesempurnaan dan kemuliaan Negara Pasundan yang merdeka berdaulat dan berdasarkan demokrasi (kerakyatan) dalam ikatan federasi dan

termasuknya Negara Pasundan sebagai negara (tidak sebagai daerah dari Republik Jawa dan Sumatera), dari Negara Indonesia Serikat, dalam sementara waktu dalam waktu dalam lingkungan Kerajaan Belanda (Junaedi, 1989, hlm. 45).

Suria Kartalegawa dengan didukung oleh pihak Belanda, seperti Kolonel Thomson di Bogor, Residen Priangan M. Klassen di Bandung, pemangku jabatan Gubernur Jakarta CWA Abbenhuis untuk mengadakan kampanye besar-besaran khususnya di Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan PRP. Menurut Wal (1976, hlm. 512) saat bekampanye, Suria Kartalegawa menggunakan bendera sebagai lambang PRP yang berwarna Putih Hijau yang melambangkan harapan dan kesucian. Nampak warna bendera tersebut nantinya akan identik dengan bendera Negara Pasundan yakni Hijau Putih Hijau. Menurut Lubis et al (2003, hlm. 235) setelah mendapatkan bantuan dari pihak Belanda, Suria Kartalegawa mengklaim pada tahun awal tahun 1947 sudah terdapat 250.000 orang yang menjadi anggota Partai Rakyat Pasundan. Dengan adanya dukungan yang sangat banyak, akhirnya Kartalegawa memproklamasikan Negara Pasundan pada 4 Mei 1947. Proklamasi dan rapat umum Negara Pasundan tersebut dilakukan di alun-alun Bandung. Kabarnya 4000 orang Bandung dan sekitarnya mengikuti kegiatan proklamasi Negara Pasundan dan rapat umum ini. Rakyat yang dikerahkan terutama dari wilayah Kiaracondong dan Ujung Berung yang diangkut dengan truk-truk Belanda. Tidak lupa beberapa pejabat Belanda ikut hadir dalam proklamasi dan rapat umum ini terutama Van Mook. Selain itu, kontribusi Van Mook dalam kegiatan proklamasi dan rapat umum Negara Pasundan tidak sampai disitu, sehari sebelum proklamasi dan rapat umum tepatnya tanggal 3 Mei 1947, Van Mook mengirim surat kepada Kepala Komandan Divisi B de Waal untuk menyukseskan rapat umum di Bandung. Bantuan yang diminta oleh Van Mook berupa transportasi yakni truk- truk Belanda yang digunakan untuk mengangkut

rakyat yang akan hadir, penyebaran undangan dengan menggunakan pesawat terbang, meminjamkan uang dan kalau perlu senjata (Cribb, 1990, hlm. 139).

Tujuan PRP membentuk Negara Pasundan seperti yang diberitakan oleh Berita Indonesia pada 5 Mei 1947, adalah sebagai berikut:

- 1). PRP dengan ini memproklamasikan kemerdekaannya Negara Pasundan sesuai dengan kemauan rakyat Sunda dalam hubungan federatif, karena jalan ini adalah satu-satunya untuk politik “negara” ini di kemudian hari.
- 2). PRP akan menentang usaha-usaha untuk memasukkan daerah-daerah yang telah dimerdekakannya ke dalam republik.
- 3) PRP mendorong supaya di daerah-daerah yang telah dimerdekakannya maupun di daerah Republik diadakan plebisit atau pemungutan suara.
- 4). PRP menjadikan Bandung sebagai ibu negeri “Negara Pasundan.”
- 5). PRP akan mengurus pengembalian pabrik-pabrik dan onderneming-onderneming kepunyaan bangsa asing kepda yang punya.
- 6). PRP meminta pengakuan pemerintahan sementara di daerah-daerah yang dimerdekakannya, jika pemungutan suara berhasil.
- 7). PRP minta untuk pemerintahan sementara ini statusnya yang sama dengan pemerintahan Indonesia Timur.
- 8). PRP memilih sebagai anggota pemerintahan sementara dan negara Pasundan Raden Moh. Suria Kartalegawa sebagai presiden dan Dr. (Mr.) Kustomo sebagai pembentuk Kabinet (Kabinet Formatur)

Untuk menyebarkan informasi proklamasi Negara Pasundan, PRP menyelenggarakan rapat umum di Jakarta pada 11 Mei 1947. Selain itu dibentuk juga cabang-cabang PRP di Jakarta dan sekitarnya serta di Karawang yang dibentuk 20 cabang PRP. Tindakan lain yang dilakukan PRP lebih ekstrim lagi, pada 23 Mei 1947, anggota-anggota PRP di Bogor dengan didukung oleh Kolonel Thomson dan Residen Belanda

menculik para pemimpin-pemimpin yang dianggap Republikan, menyita kantor mereka dan menjadikannya milik Negara Pasundan untuk kegiatan operasional (Cribb, 1990, hlm. 1939-140). Aksi tersebut dicap sebagai aksi separatis yang dilakukan oleh PRP dan Negara Pasundan. Banyak kecamatan terjadi

dari berbagai pihak, khususnya para tokoh Republikan di Jawa Barat. Bahkan orang tua dari Suria Kartalegawa yang berada di Garut sangat mengecam aksi separatis itu. Beberapa pandangan pers pun bersikap demikian, banyak yang mengecam Suria Kartalegawa dkk. *Suara Kabar Merdeka* pers dari Jakarta yang dipimpin oleh B.M Diah, yang menurut Suwirta (2015, hlm. 136) bahwa dalam surat kabar “*Suara Kabar Merdeka*” yang sangat republikan memplesetkan nama Presiden pertama Negara Pasundan yang berasal dari Partai Rakyat Pasundan, menurutnya Kartalegawa yang memiliki arti Kaula Anak Rahayat Talaekan Anu Linglung Ewad Gundal Agung Walanda Asalna yang artinya, saya (Kartalegawa) anak rakyat jajahan yang linglung dan bingung, asalnya budak besar dari Belanda. Selain itu dalam surat kabar yang lain yakni “*Kedaulatan Rakjat*” yang menurut Suwirta (2015, hlm. 150) *Kedaulatan Rakjat* mengejeknya dengan tokoh yang pantas diberi nama Mohammad Van Mook Soerja Nica Kartalegawa. Nampaknya, pers atau surat kabar ini yang pada masa Revolusi yang pro terhadap pemerintah Indonesia, di satu sisi merupakan serangan terhadap pihak Belanda, di satu sisi lagi merupakan serangan terhadap orang-orang atau organisasi yang dinilai menjadi kaki tangan atau pendukung dari pihak Belanda.

Sementara itu rapat-rapat umum beberapa wilayah di Jawa Barat diadakan untuk menentang pembentukan Negara Pasundan itu bahkan di Garut tentara Republik menjanjikan uang sepuluh ribu rupiah bagi mereka yang dapat menangkap hidup atau mati Suria Kartalegawa. Reaksi lain berasal dari keluarga besar tokoh Sunda terkemuka di Jawa Barat yakni Wiranatakusumah V. Tokoh-tokoh Republikan inipun membuat pamflet-pamflet

yang seolah-olah ditandatangani oleh Suria Kartalegawa, isi pamflet tersebut adalah seolah-olah Suria Kartalegawa menyatakan bahwa ia mencabut proklamasi Negara Pasundan dan menyatakan loyal kepada pemerintah Republik Indonesia (Zuhdi, 2003, hlm. 92). Selain itu, tokoh-tokoh Paguyuban Pasundan yang notabeni merupakan organisasi pendidikan dan kebudayaan Sunda sangat menentang usaha-usaha dari Suria Kartalegawa. Pada tahun 1947 di Yogyakarta diumumkan berdirinya kembali Paguyuban Pasundan dengan nama Paguyuban Pasundan Republik Indonesia (PPRI) yang diketuai oleh Ir. Mochammad Enoch, seorang pemuka Paguyuban Pasundan yang menjabat sebagai walikota Yogyakarta (Ramelan, 1983, hlm. 54). PPRI ini lahir sebagai bentuk reaksi atas lahirnya PRP. Mohammad Enoch ini yang menjadi penggerak menentang atas hadirnya PRP. yang ketika itu menjadi wali Kota Yogyakarta (Sjamsuddin, 1992, hlm. 32). Yang lebih menarik adalah siaran yang dilakukan oleh ibu kandung dan putri Suria Kartalegawa, sang ibu yang sudah lanjut usia berbicara atas nama keluarga di stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Garut yang ditunjukkan kepada anaknya. Ia menyatakan bahwa ibu, saudara-saudaranya, dan pamannya Abas Cianjur (mantan bupati Cianjur yang kemudian tinggal di Tasikmalaya) tidak menyetujui Negara Pasundan yang didirikan oleh anaknya itu.

Sedikitnya dukungan, berbagai permasalahan serta penolakan beberapa tokoh khususnya di Jawa Barat terhadap PRP serta Negara Pasundan yang didirikan oleh Suria Kartalegawa yang mengakibatkan dukungan dan bantuan dari penguasa Belanda semakin berkurang, hal ini dinilai karena Kartalegawa tidak mampu mengemban tugasnya dan gagal menunjang kepentingan Belanda. Menurut Cheong (1982, hlm. 107), Van Mook mengeluarkan komentarnya pada Kartalegawa:

“You act like Hitler. You made it very difficult for me with regards to the Republic. Your proclamation had no antecedents. Without proving that the Sundanese people support the PRP, you have done not good with

the proclamation. You are against the Republic and have made things difficult for us”.

PRP dan Negara Pasundan tidak lantas bubar, namun lenyap dengan sendirinya. Meskipun begitu, PRP masih memberikan kontribusi dalam pembentukan Negara Pasundan Jilid II.

### **PRP dan Negara Pasundan Jilid II**

Pasca Belanda menduduki sebagian besar wilayah di Jawa Barat dengan Agresi Militer yang dilakukan di bulan Juli 1947, maka sesuai dengan tujuan awal, Belanda berusaha untuk membentuk (kembali) negara Federal di Jawa Barat. Hal ini melihat bahwa Suria Kartalegawa dan PRP nya tidak dapat diandalkan lagi oleh pihak Belanda. Belanda mencoba merubah haluan dengan menggunakan metode yang baru terutama melibatkan tokoh-tokoh Jawa Barat yang lain yang dianggap memiliki kontribusi lebih dalam konteks sosial, budaya dan ekonomi di Jawa Barat. Langkah awal yang dilakukan oleh pihak Belanda adalah yang dilakukan oleh pihak Belanda adalah mendukung adanya Konferensi Jawa Barat untuk membahas keberadaan keberlanjutan negara Pasundan. Konferensi Jawa Barat I antara 13 sampai 18 Oktober 1947, dilanjutkan dengan Konferensi Jawa Barat II antara 16 sampai 20 Desember 1947, kemudian diakhiri dengan Konferensi Jawa Barat III antara 23 Februari sampai 5 Maret 1948.

Konferensi Jawa Barat I sebenarnya telah dianggap sebagai peletak dasar dari pembentukan Negara Pasundan. Konferensi itu dihadiri oleh 50 orang anggota pemuka-pemuka rakyat di Jawa Barat kecuali dengan Banten. Selain itu, Konferensi ini juga dihadiri oleh beberapa pejabat dari pihak Belanda, mmenurut Lubis et al (2003, hlm. 239) dalam Konferensi ini dibicarakan berbagai hal antara lain bagaimana Jawa Barat membentuk pemerintahan dengan cepat, keinginan Belanda untuk menghilangkan sekat pamongpraja Belanda dan pamongpraja Indonesia, selain itu dibahas juga bagaimana rakyat Jawa Barat berkontribusi dalam pembentukan Negara

Republik Indonesia Serikat serta bagaimana rakyat Jawa Barat dapat memulihkan keamanan khususnya yang ada di Jawa Barat. Dalam konferensi itu dibentuk sebuah panitia penghubung yang menjadi jembatan antara Pejabat Belanda dengan rakyat. Tugasnya menyiapkan suatu konferensi dari semua wakil golongan rakyat di Jawa Barat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri sementara atas dasar demokrasi. Dalam panitia penghubung itu ditunjuk R. Hilrnan Jayadinigrat sebagai ketua, dengan anggota-anggota R. Juwarsa, R. Tirtasuyatna, dan R. Sunariakusumah, R. Musa Sastranegara.

Dari pandangan umum beberapa tokoh Jawa Barat memiliki pandangan yang bermacam-macam. Dari yang bermacam-macam ini kita dapat melihat bahwa paling sedikit ada tiga pihak yang saling berbeda pendapat; di satu sisi karena merasa diri orang Sunda ada yang setuju dengan pembentukan Negara Pasundan, di lain sisi meskipun ia orang Sunda tetapi menolak sama sekali pembentukan negara baru, apalagi harus dipisahkan dari Republik Indonesia. Kemudian yang berada di tengah-tengah bersikap ambivalen dengan variasinya : setuju dengan pemerintahan baru tetapi sementara, atau pemerintahan yang bercorak Islam, atau menuntut daerah istimewa tertentu. Gambaran yang serupa ini sebenarnya dapat dilihat dalam Konferensi Jawa Barat II dan Konferensi Jawa Barat III, bahkan setelah Negara Pasundan harus diterima sebagai suatu kenyataan dan Konferensi Jawa Barat III menjadi Parlemen Pasundan, ketiga sikap itu harus terus dibawa-bawa.

Sehubungan dengan hasil-hasil Konferensi Jawa Barat II itu. sejumlah 20 orang pemuka dan intelektual Jawa Barat pada 20 Desember 1947 segera mengeluarkan manifest yang menentanginya. Manifest yang kemudian dikenal dengan "Manifest 20" yang ditandatangani antara lain oleh Prof. Dr. Juhana Wiradikarta dan Dr. R. Temenggung Jumhana Wiriarmaja. Yang isinya: 1. Konferensi Jawa Barat II tidak mempunyai otoritas untuk

membuat keputusan apapun mengenai status Jawa Barat ;

Dalam hubungannya dengan kenyataan bahwa Jawa Barat merupakan suatu bagian integral dari wilayah Republik Indonesia dan kenyataan bahwa Pemerintah Republik Indonesia memberikan kesempatan sepenuhnya kepada wilayah-wilayahnya untuk mendapatkan otonomi maka status Jawa Barat harus ditentukan dalam konsultasi dan persetujuan dengan Pemerintah Republik Indonesia (Drooglever & Schouten, 1988, hlm. 478-479).

Dengan alasan yang berbeda, timbul reaksi keras dari dua pihak tokoh Jawa Barat menentang rencana pembentukan Negara Jawa Barat itu. Di satu pihak ialah PRP dari Suria Kartalegawa. Nampaknya, hal ini menunjukkan kekecewaan dari Suria Kartalegawa dan PRP terkait keputusan Konferensi dan sikap Belanda. Mereka menolak Konferensi itu karena mereka berpegang teguh kepada Negara Pasundan yang sudah diproklamasikan oleh Suria Kartalegawa. Mereka menyiarkan Naskah Perjuangan Pasundan dan menyebutkan bahwa Negara Pasundan Merdeka itu sudah ada karena telah memenuhi syarat-syarat bagi tegaknya suatu negara yaitu adanya wilayah, rakyat dan pemerintah. Akan tetapi berhubung keadaan masih kacau, maka untuk sementara pemerintah diserahkan kepada Belanda. Untuk menggiatkan kebangsaan Pasundan, PRP menganjurkan penggunaan bahasa Sunda sebagai bahasa kebangsaan dan untuk menghidupkan kebudayaan Sunda asli dianjurkan memakai pakaian kebangsaan, antara lain ikat kepala khas Sunda. Tetapi setelah Suria Kartalegawa dan PRP ditunjuk Belanda ikut dalam Parlemen Pasundan kemudian sikap PRP tidaklah menentang apa yang dikehendaki dalam Konferensi.

Singkatnya, Konferensi Jawa Barat ketiga dilaksanakan pada 23 Februari-5 Maret 1948. Dalam Konferensi ini yang paling fundamental dibahas mengenai nama Negara Federal di Jawa Barat, terdapat dua suara terkait penamaan, ada yang mengusulkan menggunakan nama



Jawa Barat, namun ada juga yang mengusulkan tetap menggunakan Negara Pasundan (Lubis et al, 2003, hlm. 242). Perlu diketahui bahwa nama Negara Pasundan adalah rekomendasi dari Suria Kartalegawa, menurutnya bahwa istilah "Pasundan" ini mempunyai arti historis-kultural yang amat besar bagi etnis Sunda; pada tahun 1926 yang menurut Ekadjati (2014, hlm. 83) dimana Provinsi Pasundan telah lahir dari tanggal 1 Januari 1926, pemerintah Hindia Belanda telah resmi menerima istilah ini, Nama "Jawa Barat" (West Java) adalah istilah kedudukan geografis-territorial yang diberikan kemudian oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai konsekuensi untuk tetap konsisten terhadap penamaan daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur (Sjamsuddin, 1992, hlm. 49). Hingga akhirnya nama Negara Pasundan yang terpilih dalam Konferensi Jawa Barat III. Selain itu, ada juga yang paling penting dalam Konferensi Jawa Barat III adalah pemilihan Wali Negara. Terdapat dua calon yakni; Wiranatakusumah V dan R.A.A Hilman Jayadiningrat. Wiranatakusumah V memiliki track record sebagai mantan Bupati Bandung, mantan anggota Volksraad, Wakil Residen Priangan di zaman Jepang (Fuku Priangan Suco), anggota BPUPKI dan PPKI, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 1945 dan ketika pemilihan menjadi Wali Negara.

Pasundan menduduki jabatan Ketua Dewan Pertimbangan Agung Republik Indonesia. Selain itu R.A.A Hilman Jayadiningrat sama-sama memiliki track record yang tidak dapat disepelekan, ia merupakan mantan Bupati Serang (Banten), pada zaman pendudukan Jepang menjadi Wakil Residen Bogor, pasca kemerdekaan menjadi Bupati Sukabumi dan kemudian menjadi Reomba Jawa Barat. Yang perlu dicermati adalah R.A.A Hilman Jayadiningrat merupakan perwakilan dari kelompok Federal (Permana. et al, 2014, hlm. 8). Yang terpilih menjadi Wali Negara adalah Wiranatakusumah V. Beberapa pihak mempertanyakan mengapa Wiranatakusumah V bersedia untuk menjadi Wali Negara Pasundan yang kental dengan konsep

Federal padahal dirinya merupakan seorang Republikan. Menurut Irshanto (2016, hlm. 7) ketika proses pelantikan, Wiranatakoesoema melakukan pidato singkat selaku Wali Negara Negara Pasundan yang, intinya berisi pembelaan Wiranatakusumah V yang berjiwa republik sejati dan tidak menghendaki Jawa Barat terpisah dari Republik Indonesia dan cara yang ditempuhnya ini hanya sebuah strategi saja.

Ketika PRP tidak berdaya dalam kontestasi pemilihan Wali Negara dan secara de jure dan de facto Suria Kartalegawa tidak lagi menjabat posisi Wali Negara, kontestasi selanjutnya adalah dalam Parlemen Negara Pasundan. Beberapa fraksi menghiasi Parlemen Negara Pasundan dalam Parlemen Sementara Pasundan ini terdapat sepuluh Fraksi atau golongan yaitu Fraksi Nasional, Fraksi Kesatuan, Fraksi Indonesia, Fraksi PRP, Fraksi Tengah, Fraksi IEV, Fraksi Nederlandse Groep, Fraksi Katolik, Golongan Cina dan Golongan Arab (Sjamsuddin, 1992, hlm. 49). Fraksi Nasional, Fraksi Kesatuan, Fraksi Indonesia dan Fraksi Partai Rakyat Pasundan merupakan beberapa Fraksi terbesar dalam Parlemen Negara Pasundan. Dalam sidang parlemen yang pertama berbagai Fraksi menyampaikan pandangan umum, tak terkecuali dengan PRP, antara lain; Mencapai kesempurnaan dan kemuliaan Negara Pasundan yang merdeka dan berdaulat dan berdasarkan demikrasi (kerakyatan) dalam ikatan federatie dan masuknya Negara Pasundan sebagai negara (bukan sebagai daerah dari Republik Jawa dan Sumatera) dari Negara Indonesia Serikat dan sementara waktu dalam lingkungan Kerajaan Belanda (Sjamsuddin, 1992, hlm. 51). Pada masa-masa ini oleh pimpinannya yaitu Suria Kartalegawa, akhirnya Fraksi PRP diganti namanya menjadi Partai Rakyat Demokrasi Indonesia (Pardi). Menurut Suria Kartalegawa, anjuran PRP untuk mendirikan Negara Pasundan telah berhasil; oleh sebab itu selanjutnya dalam pandangan Suria Kartalegawa perlu berpandangan politik yang lebih luas menuju Republik Indonesia Serikat

dan akan terus menentang sisa-sisa kolonial yang masih ada. Namun, secara labeling Pardi masih saja dianggap sebagai PRP (Sjamsuddin, 1992, hlm. 52).

Menurut Lubis. et al (2003, hlm. 242) kedudukan Parlemen dinilai kuat sehingga Kabinet bertanggung jawab kepada Parlemen bukan kepada Presiden atau Wali Negara walaupun yang menunjuk formatur dalam Kabinet adalah Presiden atau Wali Negara. Persaingan menjadi Perdana Menteri Negara Pasundan sangatlah ketat, R. Adil Puradierdja dari Fraksi Indonesia, R. Suradiraja dari Fraksi Nasional, R. Male Wiranatakusumah dari Fraksi Kesatuan. Nampak, minimnya dukungan dari berbagai pihak, Suria Kartalegawa tidak mencalonkan diri, bahkan dirinya dan PRP bersikap sebagai oposisi siapapun calonnya yang terpilih. Pada akhirnya R. Adil Puradierdja yang terpilih menjadi Perdana Menteri. Suria Kartalegawa menjadi oposisi, terlihat dari susunan Kabinet yang tidak adanya perwakilan dari

PRP. Kabinet tersebut belum banyak melakukan kegiatan program kerja. Karena usianya baru 6 bulan, oleh karena tidak setuju dengan Agresi Militer Belanda II pada 19 Desember 1948, beberapa hari setelah kejadian itu ia mengajukan pengunduran diri sebagai Perdana Menteri dan R. Adil Puradiredja mengutuk Aksi Militer Belanda tersebut.

Letnan Jenderal Simon Spoor dan Komisioner Pemerintah Belanda Dr. R. Van Diffelen menemui Wiranatakusumah V sebagai Wali Negara Pasundan untuk menunjuk formatur kabinet baru. Nampaknya Wiranatakusumah V tidak akan pernah menunjuk Suria Kartalegawa menjadi Perdana Menteri, dia lebih menginginkan Perdana Menteri yang sama-sama beraliran Republikan. Akhirnya ditunjuk Mr. R. T. Jumhana Wiriaatmaja sebagai Perdana Menteri sementara dan dalam perkembangannya menjadi Perdana Menteri tetap selanjutnya. Lagi-lagi Suria Kartalegawa dan PRP tetap menjadi oposisi. Pada 15 Desember 1949 Mr.

R. T. Jumhana Wiriaatmaja memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Perdana Menteri.

### **Bubarnya Negara Pasundan, Bubarnya PRP**

Wiranatakusumah V, mencari pengganti R. T. Jumhana Wiriaatmaja sebagai Perdana Menteri. Nama R. M. Sewaka muncul, ia adalah seorang tokoh yang berasal dari Cirebon. Dirinya dikenal dengan seorang Republikan. R. M. Sewaka bersedia menerima tawaran tersebut, asalkan dia diberi kebebasan dalam menjalankan program kerja di dalam kabinetnya yang menurutnya lebih ke arah pembubaran Negara Pasundan (Lubis et al, 2003, hlm. 248). Akhirnya R. M. Sewaka tidak ditunjuk sebagai Wali Negara Pasundan Selebihnya, R. M. Sewaka merupakan lawan politik dari Suria Kartalegawa, ketika di awal pembentukan Negara Pasundan Jilid I. Menurut Zuhdi (2003, hlm. 83) ketika Negara Pasundan Jilid I lahir, ia sering mengadakan kunjungan ke daerah-daerah yang ada di Jawa Barat. Hal ini bertujuan mengedukasi masyarakat Jawa Barat bahwa Negara Pasundan (Jilid I) yang lahir adalah buatan Belanda serta tidak seyogyanya masyarakat Jawa Barat mengikuti hal tersebut.

Tanpa alasan yang jelas dan bukan merupakan tokoh yang besar di Jawa Barat, akhirnya Wiranatakusumah V menunjuk Anwar Tjokroaminoto seorang pimpinan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) menjadi Perdana Menteri. Namun, penulis melihat bahwa bagaimana Anwar Tjokroaminoto menerima jabatan ini adalah sebagai eksistensi politik dirinya dan PSII. Selain itu, masalah eksistensi ini akan berujung kepada pendanaan partai. Menurut Pranoto (2015, hlm. 182) "Anwar melihat bahwa agar PSII bertahan di bawah tekanan-tekanan yang ada, partai itu harus disokong oleh pendanaan yang kuat. Dengan menggunakan modal penghormatan tradisional, PSII Anwar sebagai "trah" Tjokroaminoto memberikan dukungannya kepada kubu Pragmatis untuk mendapatkan dana". Anwar Tjokroaminoto dinilai kurang

mengerti politik khususnya di Negara Pasundan. Dalam formatur dan persiapan program kerja bagi Negara Pasundan, dirinya dinilai dekat dengan Suria Kartalegawa dan PRP-nya. Tidak lama, sebulan setelah pengangkatannya sebagai Perdana Menteri Negara Pasundan, tepatnya tanggal 23 Januari 1950, terjadi pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Gerakan Operasi Militer yang pertama adalah untuk menumpas pemberontakan APRA yang terjadi di Bandung. Pemberontakan yang dipimpin oleh R. P. Westerling ini terjadi di Bandung dan Jakarta.

Di Bandung pemberontakan APRA melakukan penyerangan terhadap markas Batalyon Siliwangi sebagai pusat kekuatan militer APRIS untuk wilayah Jawa Barat. Pemberontakan APRA didukung oleh kesatuan RST, yaitu sebuah pasukan khusus Belanda yang berjumlah 800 personil dengan senjata lengkap (Suryawan, 2013, hlm. 4). Penyerangan terhadap markas Divisi Siliwangi ditujukan untuk menghapus unsur APRIS dari Negara Pasundan dan mempertahankan bentuk Negara Pasundan sebagai salah satu Negara Federal. Pemberontakan tidak berlangsung lama, APRA dengan cepat ditumpas oleh Divisi Siliwangi. Penangkapan besar-besaran dilakukan terhadap pihak-pihak yang dianggap pro dengan APRA. Beberapa diantaranya adalah Anwar Tjokroaminoto dan Suria Kartalegawa, mereka ditangkap secara bersamaan. Bagi rakyat, gerakan APRA terkait dengan Negara Pasundan. Bayangkan saja, para pimpinan Negara Pasundan tidak diganggu sama sekali, sedangkan para pegawai Republik Indonesia dicari dan ditembak. Akibat dari peristiwa tersebut banyak suara menuntut pembubaran Negara Pasundan hal ini juga didukung oleh parlemen Negara Pasundan. Pada tanggal 30 Januari 1950, pemerintah Negara Pasundan mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintahan RIS untuk memberikan bantuan sepenuhnya mengatasi kesulitan-kesulitan yang sedang dialami. Pada 4 Februari 1950, Presiden RIS dengan Surat Keputusan No. 58 mengangkat R. M Sewaka

menjadi komisaris pemerintah RIS di Negara Pasundan.

R. M. Sewaka kedudukannya sama dengan Perdana Menteri. Hingga pada akhirnya dilakukan sidang di Gedung Parlemen Negara Pasundan (Gedung Dwi Warna). Sidang yang dihadiri oleh 159 orang dari utusan kabupaten-kabupaten di Jawa Barat secara aklamasi menggabungkan bekas wilayah Negara Pasundan ke dalam Negara Republik Indonesia. Dan pada 11 Maret 1950 keluarlah Surat Keputusan RIS No. 113 yang menyatakan bahwa wilayah Pasundan termasuk ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Kemudian pemerintahan Komisaris RIS di Jawa Barat diganti dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur R. M. Sewaka. Akhirnya dengan ditandai surat keputusan terakhir tersebut Negara Pasundan dianggap bubar. Bagi PRP dengan buabrnnya Negara Pasundan dan dipenjaranya Suria Kartalegawa, PRP lenyap dengan sendirinya.

## **SIMPULAN**

Berbagai peristiwa muncul pada masa Revolusi Indonesia 1945-1949. Hal ini tidak terlepas dari kembalinya Belanda ke Indonesia dengan maksud menguasai kembali Indonesia. Upaya perlawanan dilakukan, tidak hanya militer, tetapi diplomasi. Nampaknya, diplomasi ini yang paling efektif dalam melakukan perlawanan bagi pihak Belanda. Diplomasi yang pertama yang dilakukan oleh Indonesia adalah perundingan Linggarjati. Pada perundingan Linggarjati, delegasi Indonesia diketuai oleh Sutan Sjahrir. Beberapa hasil dari perundingan Linggarjati mendapatkan protes dari berbagai elemen masyarakat, selain wilayah Indonesia yang hanya sebatas dengan Sumatera, Jawa dan Madura serta adanya pasal yang memperbolehkan membentuk Negara Federal di Indonesia. Meskipun pada perundingan ini genjatan senjata antara pihak Belanda dan Indonesia dihentikan. Yang menjadi kegaduhan selanjutnya adalah

muncul benih-benih Negara Federal di Jawa Barat. Pada masa-masa ini dengan dukungan pihak Belanda di Indonesia khususnya Van Mook, Suria Kartalegawa membentuk PRP. PRP melakukan sejumlah kampanye agar rakyat Jawa Barat mendukungnya, selain itu hal ini dilakukan dalam rangka mencari kader untuk PRP. Menarik mengenai PRP, di kala tokoh lain mendirikan berbagai partai yang beraliran ideologi, namun PRP lahir atas dasar primodialisme ke-Sundaan.

Beberapa bulan berkampanye, Suria Kartalegawa mengklaim bahwa PRP sudah memiliki kader sekitar 250.000 orang yang tersebar di berbagai wilayah Jawa Barat. Atas klaimnya ini dan dukungan dari berbagai pihak Belanda, Pada awal bulan Mei 1947 Suria Kartalegawa memberanikan diri untuk membentuk Negara Pasundan (Jilid 1). Suria Kartalegawa dan PRP-nya memproklamasikan kelahiran Negara Pasundan dan mengangkat Suria Kartalegawa sebagai pimpinan Negara Pasundan. Tidak lama, akibat berbagai permasalahan dan berbagai pertentangan terhadap Suria Kartalegawa, dirinya dianggap gagal dalam mengembangkan Negara Pasundan. Perlahan, Suria Kartalegawa dengan PRP dan Negara Pasundan lenyap dengan sendirinya. Beberapa tokoh Jawa Barat membahas keberlanjutan Negara Federal di wilayah Jawa Barat, pertengahan tahun 1947 hingga awal tahun 1948 dilakukan 3 Konferensi rakyat. Hasilnya, rakyat menghendaki Negara Pasundan dengan corak yang berbeda. Wiranatakusumah V terpilih menjadi Wali Negara. Peran PRP lebih berkiprah di dalam tubuh Parlemen Negara Pasundan. Pada kepemimpinan Perdana Menteri R. Adil Puradiredja dan Mr. R. T. Jumhana Wiriaatmaja dari tahun 1948-1949, PRP lebih aktif bersikap sebagai oposisi. Hal ini wajar karena sebenarnya Suria Kartalegawa menginginkan peran lebih dalam Negara Pasundan. Setelah MR. R. T. Jumhana Wiriaatmaja mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri akhirnya ditunjuklah Anwar Tjokroaminoto pada Desember 1949 dari PSII untuk menjadi Perdana Menteri

Negara Pasundan. Anwar Tjokroaminoto dianggap kurang mengerti politik khususnya di dalam Negara Pasundan, ketika perencanaan program kerja dan formatur kabinet yang akan ia susun dan bentuk, ia dikabarkan dekat juga dengan Suria Kartalegawa dengan PRP nya. Namun sebelum rencananya terealisasikan, pada Januari 1950, ia bersama Suria Kartalegawa ditangkap oleh Divisi Siliwangi karena dianggap dekat dengan APRA. Hingga pada akhirnya mereka dipenjara. Selanjutnya diangkatlah R. M Sewaka menjadi Komisaris RIS di Negara Pasundan. Hingga muncul keputusan wilayah Negara Pasundan bergabung dengan Negara Republik Indonesia. R. M Sewaka jabatannya berubah dari Komisaris RIS Negara Pasundan menjadi Gubernur Provinsi Jawa Barat. Hingga pada akhirnya, seiring dengan bubarnya Negara Pasundan, diikuti juga oleh lenyapnya PRP dengan sendirinya.

## REFERENSI

- Anderson, B. (1988). *Revoloesi pemoeda pendudukan jepang dan perlawanan di jawa 1944 - 1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Cheong, Y. M. (1982). *H. J. Van Mook and indonesian independence; a study of his role in dutch-indonesian relation*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Cribb, R. B. (1990). *Gejolak revolusi di jakarta 1945-1949*. Jakarta: Grafiti.
- Drooglever, P.J., & Schouten, M.J.B. (1988). *Officiele bescheiden betreffende de nederlandschIndonesrsche betrekkingen 1945-1950*. Gravenhage: Martinus Nijhoff.
- Ekadjati, E. S. (2014). *Dari pentas sejarah sunda sangkuriang hingga juanda*. Bandung: PT Kiblat Buku Utama.
- Horiyama, M. (2013). *Semangat baru: kolonialisme budaya cetak dan kesastraan sunda abad ke-19*. Depok: Komunitas Bambu.
- Irshanto, A.B. (2016). *Kiprah Politik Paguyuban Pasundan Periode 1927-1959*.

- Jurnal Untirta*. Hlm. 1-10. Diakses dari :<http://jurnal.untirta.ac.id/index.php/Candrasangkala/article/download/2849/2244>
- Junaedi. (1989). Runtuhnya negara pasundan. *Skripsi*. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme & revolusi indonesia*. Depok: Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, S., Poesponegoro, D. M., & Notosusanto, N. (1975). *Sejarah nasional indonesia Jilid ke-vi*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lubis, N. H. et al (2003). *Sejarah tatar sunda jilid 2*. Bandung: Lembaga Penelitian Universitas Padjajaran.
- Moedjiyanto G. (1988). *Indonesia abad ke-20: dari kebangkitan nasional sampai linggarjati*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Permana, R. et al. (2014). *Inventaris arsip statis: pemerintah negara pasundan periode tahun 1947-1950*. Bandung: Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat.
- Pranoto, C. B. (2015). Partai dan patron: riwayat psii melalui gejolak zaman. *Jurnal Politik*. 1(1), hlm. 77-84.
- Ramelan, H. R. (1983). Sejarah pagoejoeban pasoendan (1914-1982). *Skripsi*. Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Ricklefs, M.C. (2005). *Sejarah indonesia modern: 1200-2004*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta.
- Roem, M. (1972). *Bunga rampai dari sejarah (I)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Roem, M. (1977). *Bunga rampai dari sejarah (II)*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Satori, D., & Komariah, A. (2014). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sjamsuddin, H., et al. (1992). *Menuju negara kesatuan; negara pasundan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metodologi sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian pendidikan: pendekatan kuantitatif, kualitatif dan r&d*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sumardjo, J. (2015). *Sunda Pola Rasionalitas Budaya*. Bandung: Penerbit Kelir.
- Suryawan, A. (2013). Peranan apris dalam menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan ris tahun 1949-1950. *E-Journal Pendidikan Sejarah*. 1(1), hlm. 1-6. Diakses dari : <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/download/1704/1204>
- Suwirta, A. (2015). *Revolusi indonesia dalam news and views: sebuah antologi sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tuhuteru, J.M.A. (Tanpa Tahun). *Riwayat singkat terdirinja negara pasoendan*. Jakarta: Djawatan Penerangan Pemerintah.
- Wal, V.D. (1976). *Officiele bescheiden betreffende de nederlands - Indonesiasche betrekkingen 1945-1950*. 'Gravanhage: Meartinus Nijhoff.
- Zuhdi, S. (1994). Suria Kartalegawa dan negara pasundan dalam dinamika politik di daerah pendudukan belanda di jawa barat, 1947-48. *Laporan Penelitian*. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Zuhdi, S. (2003). Antara sewaka dan soeria kartalegawa: dinamika politik pemerintahan di jawa barat pada masa revolusi indonesia. *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*. 7(4), hlm. 79-96.

Surat Kabar :  
*Berita Indonesia*, 5 Mei 1947

